

BAB III
POLITIK LUAR NEGERI PRANCIS DARI PEMERINTAHAN
NICOLAS SARKOZY (2007-2012) KE PEMERINTAHAN
FRANCOIS HOLANDE (2012-2016)

Prancis merupakan salah satu negara anggota Uni Eropa yang memiliki pengaruh kuat dalam konstelasi politik internasional (keadaan/perkembangan kehidupan politik internasional). Memasuki era milenium ketiga, dinamika politik internasional mulai berubah khususnya berkaitan dengan politik keamanan global, salah satunya berkaitan dengan isu konflik Israel-Palestina. Prancis dihadapkan pada persoalan politik-keamanan internasional yang semakin kompleks dan semakin lama mengerucut dan mampu menarik intervensi Prancis. Ini dapat dilihat dari transformasi kepemimpinan dari era pemerintahan Nicolas Sarkozy ke era pemerintahan Francois Hollande, politik luar negeri Prancis berkembang pada kedua rezim ini semakin impresif. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan luar negeri Prancis, diantaranya prestise sejarah, pengaruh bahasa dan budaya, potensi ekonomi dan militer secara signifikan yang berhubungan dengan jumlah dan ukuran populasi Prancis. Pada bab III ini akan diuraikan lebih lanjut tentang politik luar negeri Prancis dari masa pemerintahan Nicolas Sarkozy ke pemerintahan Francois Hollande.

A. Deskripsi Kepemimpinan dan Politik Luar Negeri Prancis Era Nicolas Sarkozy

Prancis merupakan negara moderen dan demokratis, yang berarti pengambilan keputusan harus memperhatikan birokrasi dan perimbangan kelompok kepentingan. Namun pengaruh dari *leadership* juga memberikan pengaruh yang

kuat.⁵⁵ Pada era kepemimpinan Nicolas Sarkozy, beliau dikenal memiliki *motto* yang disebut dengan “*La Rupture*”, berisi janji Sarkozy sebagai Presiden baru dengan ide-ide baru dalam memimpin Prancis. Ide-ide tersebut seperti pemotongan pajak lembur, tindakan Afirmatif (*Affirmative action*), dan saat itu berani membentuk suatu Departemen Imigrasi dan identitas Nasional. Namun, dalam masa jabatan Sarkozy ada beberapa kebijakan yang tidak dapat berjalan lancar dengan berbagai tantangan domestik, regional, dan internasional yang dihadapi.

1. Profil Nicolas Sarkozy

Nicolas Paul Stephane Sarkozy de Nagy-Bocsa atau Nicolas Sarkozy lahir di Paris, 28 Januari 1955. Nicolas Sarkozy adalah mantan presiden ke-23 Prancis yang masa jabatannya berakhir pada 15 Mei 2012. Sebelum menjadi presiden, Sarkozy adalah pemimpin *Union for a Popular Movement*, merupakan sebuah partai di Prancis. Selain itu, Nicolas Sarkozy pernah menjabat sebagai Walikota Neuilly-sur-Seine selama 20 tahun dan juga sebagai Menteri Interior, Menteri Pendanaan, dan Menteri Keuangan sebelum menjadi Presiden Prancis pada tahun 2007. Di dalam dunia internasional, beliau adalah seorang mantan presiden yang sering menjaga hubungan baik antar negara terutama dengan Inggris dan Amerika Serikat. Kehidupan politik Sarkozy berakhir setelah dia memutuskan untuk pensiun

⁵⁵ Sistem demokrasi Prancis merujuk pada trias politika, dimana legislatif yang ada di tangan parlemen, Eksekutif di tangan Presiden, dan Yudisial di tangan badan kehakiman. Mengenai Badan Kehakiman, para hakim ini diangkat oleh eksekutif dan terbagi menjadi dua. Yaitu Peradilan Kasasi (*Court of Casation*) dan Peradilan Hukum Administrasi. Dalam perkara-perkara yang rumit dan berat, penanganannya akan dilakukan oleh *Tribunal des Conflits*.

dari dunia politik setelah kalah dalam pemilihan presiden pada tahun 2012 oleh Francois Hollande dengan total 3.2%.⁵⁶

Sarkozy adalah satu-satunya presiden Prancis yang lahir setelah perang dunia kedua. Perpindahan kekuasaan dari Jacques Chirac kepada Sarkozy dilakukan di *Elysee Palace*, selain itu Sarkozy juga mendapat kode rahasia dari gudang persediaan senjata nuklir milik Prancis. Beberapa saat setelah mendapat kekuasaan sebagai pemimpin negara Prancis, Sarkozy berangkat bernegosiasi dengan Presiden Kolombia dan gerakan gerilya sayap kiri untuk membicarakan pembebasan sandera. Dan pada sore hari setelah penyerahan kekuasaan di *Elysee Palace*, Sarkozy langsung berangkat ke Jerman menemui Angela Merkel, Kanselor Jerman.⁵⁷ Aksi Sarkozy yang cepat sesaat setelah mendapatkan kekuasaan sebagai Presiden Prancis adalah sebuah berita yang menarik bagi masyarakat Prancis.

2. Orientasi Politik Luar Negeri Prancis Dibawah Kepemimpinan Nicolas Sarkozy

Nicolas Sarkozy merupakan presiden Prancis yang memimpin sejak 16 Mei 2007. Pada masa kepemimpinannya, Sarkozy dihadapkan pada berbagai persoalan yang ada sejak masa kepemimpinan sebelumnya, yaitu Jaques Chirac. Permasalahan ini berkaitan dengan masalah keamanan internasional dan

⁵⁶ Denis Abrams, Nicolas Sarkozy: Modern World Leader, Chelsea House Publisher, New York, 2009, hal.24-25.

⁵⁷ “Profil Nicolas Sarkozy”, dalam <https://www.biography.com/people/nicolas-sarkozy-37799> diakses pada tanggal 28 Maret 2017.

pencapaian ekonomi-politik berkaitan dengan posisi Prancis dalam keanggotaan Uni Eropa, serta sebagai sekutu Amerika Serikat.⁵⁸

Pada awal kepemimpinannya, Sarkozy telah mengerjakan beberapa kebijakannya dalam memajukan agenda kebijakan luar negerinya. Meluncurkan beberapa inisiatif di berbagai bidang, diantaranya: bekerjasama dengan Uni Eropa untuk memenangkan persetujuan dari perjanjian Lisbon; dengan Libya, membebaskan perawat Bulgaria yang ditawan di Libya, perjanjian keamanan, dan mengundang Qaddafi dalam rencananya mengenai *Mediterranean Union*; memperbaiki hubungan dengan Jerman tentang perbedaan pendapat dengan Angela Merkel mengenai Bank Sentral Eropa dan *Mediterranean Union*; memiliki beberapa pertimbangan dengan NATO atas integrasi penuh Prancis terhadap struktur komando militer; dan memberikan isyarat terhadap Amerika Serikat atas posisi Prancis yang fleksibel terhadap militer Amerika di Luar negeri dengan vis-à-vis. Selain itu, Nicolas Sarkozy juga membahas kerjasama bilateral dan melakukan pertemuan dengan berbagai pemimpin negara dunia. Pada kunjungan ini pemerintahan Prancis di bawah kepemimpinan Nicolas Sarkozy telah meluncurkan *Joint Declaration on Strategic Partnership* Dalam kerangka kerjasama forum G-20. Pendekatan ini kemudian ditindaklanjuti dengan pengembangan kerjasama luar negeri meliputi, 18 negara baru di wilayah Asia-Afrika, 8 negara di wilayah Amerika Latin.⁵⁹ Beberapa bentuk kerjasama luar negeri yang berhasil dicapai Prancis di bawah kepemimpinan Nicolas Sarkozy,

⁵⁸ James Luluhima, "Prancis Di Tengah Pusaran Konflik", Jurnal Politik Internasional Global, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015, hal.31.

⁵⁹ Ibid.

diantaranya:⁶⁰ Pengembangan eksplorasi gas alam dan minyak bumi di Mali dengan nilai total sekitar 18,7 juta USD pada tahun 2009; Pengembangan eksplorasi gas alam dan minyak bumi di Pantai Gading (*Ivory Coast*) dengan nilai total sekitar 11,9 juta USD pada tahun 2010; Pengembangan eksplorasi dan konstruksi di Meksiko dengan nilai total sekitar 3,9 juta USD pada tahun 2009; Pengembangan kerjasama teknis dan pengelolaan hasil bumi dengan Suriah nilai total sekitar 11.2 juta USD pada tahun 2009.

Pada tanggal 6 Mei 2007, Presiden Sarkozy mengemukakan gagasannya mengenai “*Union of the Mediterranean*” dalam konferensi pers pada malam pemilihan Presiden Prancis. Gagasan ini bertujuan untuk mengumpulkan semua negara-negara Mediterania dalam sebuah organisasi baru yang akan menangani kepentingan bersama seperti anti-terorisme, energi, imigrasi, dan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, usulan mengenai gagasan ini diajukan sebagai sebuah dorongan baru untuk melakukan kerja sama yang lebih dalam dengan kawasan Mediterania. Alasan untuk melakukan kerjasama dilakukan Prancis adalah faktor sejarah, ekonomi, dan geopolitik. Dan pernyataan yang paling khas adalah bahwa perlu dibangun zona keamanan dan stabilitas di wilayah-wilayah tetangga Uni Eropa.⁶¹ Selain itu pada tanggal 23 Oktober 2007 Sarkozy juga mengembangkan gagasan tersebut pada sebuah pidato di Tangier. Dibalik gagasan ini ada tujuan Geopolitik dan politik terlihat cukup jelas. Secara Politis, kepentingan Sarkozy dalam mendirikan Uni Mediterania akan memberikan Turki sebuah tawaran

⁶⁰ Ibid,

⁶¹ A Case Study: Attitude of European Union towards Middle East and Northern Africa since 1990s https://is.mendelu.cz/eknihovna/opory/zobraz_cast.pl?cast=71666 Diakses 28 November 2016.

alternatif untuk keanggotaan Uni Eropa secara penuh. Dan tujuan secara Geopolitik adalah dengan memperkuat kiprah Prancis di kawasan Internasional.

Usulan yang dilakukan Sarkozy tidak berjalan dengan begitu baik, usulan ini bahkan mendapat kritik dari berbagai pihak tingkat tinggi. Seperti Turki yang menolak gagasan tersebut dengan alasan bahwa gagasan tersebut dianggap sebagai cara alternatif bagi Uni Eropa untuk mengakses negaranya, baik itu sebagian dari niat Prancis. Kemudian pada tanggal 5 Desember 2007, Angela Merkel menolak ide tersebut dengan alasan bahwa kebijakan untuk wilayah Mediterania harus dibatasi untuk negara-negara pesisir. Dalam menghadapi kritik tersebut, Sarkozy melakukan beberapa cara untuk memperkuat gagasannya. Pada tanggal 3 Maret 2008, Sarkozy dan Merkel melakukan pertemuan dan mengumumkan hasil dari kesepakatan atas perbedaan pendapat dan akan membahas pokok bahasan tersebut bersama *European Council* pada pertemuan yang direncanakan pada tanggal 13-14 Maret.⁶² Sedangkan menurut Duta Besar Prancis untuk Uni Eropa, Pierre Sellal menjelaskan kepada negara anggota Assemblée bahwa:

*“Pemikiran Presiden Republik mengenai Mediterranean Union terinspirasi oleh kurangnya kebijakan Mediterania yang telah dilakukan sejauh ini. Kita semua mengamati bahwa tindakan yang dilakukan dalam kerangka kebijakan lingkungan dan Proses Barcelona belum memberikan hasil yang diharapkan.”*⁶³

⁶² Michael Emerson, “*Making Sense of Sarkozy’s Union for the Mediterranean*”, CEPS Policy Brief, No.155, March 2008, hal. 1-2.

⁶³ Ibid hal 3.

Pencapaian gagasan ini memiliki standar yang tinggi terutama pada negara kawasan Selatan Timur-Tengah agar dapat menyesuaikan dengan transformasi politik dan ekonomi yang diamati di Eropa Tengah dan Timur sejak runtuhnya tembok Berlin dan kinerja ekonomi sebagian besar Asia dalam beberapa dekade terakhir. Menurut Sarkozy, Uni Eropa harus berperan menjadi sentral untuk menstabilkan wilayahnya. Dengan pengalaman sebelumnya yang mengalami banyak perang dan keterpurukan akhirnya dapat mencapai kedamaian. Hal ini dapat dijadikan sebagai gambaran bagi masyarakat Timur-Tengah dan menegaskan bahwa *Union for the Mediteranean* dapat membawa perdamaian ke kawasan tersebut sekaligus mempromosikan kerja sama ekonomi. *Union for the Mediterranean* diresmikan pada tanggal 13 Juli 2008 di Paris, dengan jumlah 43 kepala negara dan pemerintah menghadiri acara tersebut. *Union for the Mediterranean* berasal dari pertimbangan-pertimbangan yang jelas dan realistis. Ini merupakan bagian dari “*Arab Policy*” yang merupakan perkembangan hubungan yang kuat dengan dunia Arab untuk memulihkan pengaruh Prancis dan sekaligus untuk mengembangkan kepentingan ekonomi di kawasan Timur Tengah.

Pada masa pemerintahan Presiden Chirac, Prancis dengan kebijakan *Arab Policy* dianggap memiliki hubungan yang kuat dengan negara Arab sehingga menyebabkan ketegangan dengan negara Yahudi, yaitu Israel. Israel meyakini bahwa Prancis mengeluarkan kebijakan tersebut secara sistematis menerapkan sikap pro-Palestina terutama selama Intifada kedua yang dimulai pada bulan September 2000. Namun, sejak Sarkozy terpilih menjadi Presiden berikutnya hubungan antara Israel dan Prancis membaik. Sarkozy berusaha memperkuat

hubungan kedua negara tersebut. Setelah membaiknya hubungan diantara Israel dan Prancis, tidak membuat Sarkozy berubah mengenai konflik Israel-Palestina. Masih ada perbedaan pendapat antara kedua negara. Seperti perbedaan dalam menafsirkan Resolusi PBB 242 yang dikeluarkan pada 22 November 1967 antara versi yang berbahasa Inggris dan Prancis. Selain itu, Prancis dan Israel memiliki pandangan yang berbeda mengenai hak untuk kembali bagi pegungsi Palestina. Dan pada tanggal 22 Oktober 2007, setelah melakukan pertemuan dengan Sarkozy di Paris, Perdana Menteri Israel Olmert mengatakan bahwa kedua pemimpin sepakat menyelesaikan masalah pengungsi tersebut.⁶⁴

Sarkozy telah melakukan beberapa diskusi dalam mengubah kebijakan dalam menangani konflik Israel-Palestina. Untuk menunjukkan komitmen politik dan diplomasi, Prancis menyelenggarakan *Paris Conference* pada tanggal 17 Desember 2007 di Paris dengan tujuan untuk menemukan solusi politik di Timur Tengah serta menegaskan komitmen bahwa Prancis mendukung Otoritas Palestina (dengan memberikan hibah sebesar €68m per tahun) untuk mengoperasikan layanan publik dan membayar pegawai negeri sipil di Gaza dan West Bank.⁶⁵ Prancis mempercayai dengan menyelesaikan konflik Israel-Palestina merupakan suatu kunci untuk menjaga stabilitas di wilayah Timur Tengah, dan hal tersebut dapat dicapai dengan memberikan pengakuan terhadap wilayah Palestina dan dengan menjamin keamanan Israel melalui negosiasi.

⁶⁴ Insight Turkey, Sarkozy's Policy in the Middle East: A Break with the Past?, Tsilla Hershco, hal. 84-86

⁶⁵ <http://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/israel-palestinian-territories/palestinian-territories/france-and-the-palestinian/political-relations-6021/> Di akses pada 28 November 2016

Prancis memainkan peran sebagai mediator dan bersikap netral diantara kedua belah pihak, yaitu Israel dan Palestina, serta mendorong posisi politik Prancis terhadap penyelesaian konflik tersebut. Untuk mencapai tujuannya, Prancis tidak segan untuk memberikan tekanan dan bersikap kritis terhadap Israel. Sebagai contoh, Prancis sering mengkritik negara Yahudi mengenai pemukiman kaum Yahudi dan pos-pos pemeriksaan yang dilakukan di wilayah tepi barat (*West Bank*). Sarkozy bahkan melakukan perdebatan selama kunjungannya di Yerusalem pada 18 Januari 2009, ia mengatakan bahwa Israel harus mengambil tindakan yang signifikan demi kepentingan perdamaian.

B. Deskripsi Kepemimpinan dan Politik Luar Negeri Prancis Era Francois Hollande

Perkembangan kepemimpinan di Prancis pada tahun 2012 mengalami pergantian tampuk kekuasaan dari Nicolas Sarkozy ke Francois Hollande. Peristiwa ini ternyata berdampak luas pada bidang politik luar negeri. Pada era Hollande, Prancis berhasil memperluas spektrum kerjasama luar negeri, serta menyelesaikan berbagai persoalan penting yang telah ada sejak masa kepemimpinan sebelumnya. Dalam rangka mewujudkan kepentingan nasional Prancis.

1. Profil Francois Hollande

Francois Hollande merupakan presiden terpilih Prancis itu lahir pada 12 Agustus 1954 di wilayah utara Prancis. Ia memiliki latar belakang pendidikan yang cemerlang dengan tiga gelar diploma dari *Ecole des Hautes Etudes Commerciales*

de Paris (HEC), *Institut d'Etudes Politiques de Paris (Sciences Po)* dan *Ecole nationale d'administration* (ENA). Hollande memiliki empat anak dengan Segolene Royal, yang gagal bersaing dengan Sarkozy pada pemilu 2007 lalu.⁶⁶ Hollande lahir di daerah Rouen, Prancis pada tanggal 12 Agustus tahun 1954 di sebuah keluarga kelas menengah. Ibunya merupakan seorang pekerja sosial, sedangkan ayahnya merupakan seorang dokter spesialis telinga, hidung dan tenggorokan. Ayahnya di masa lalu pernah menjabat sebagai seorang politisi ekstrem kanan di sebuah partai politik lokal di Prancis. Hollande dididik serta dibesarkan di dalam keluarganya secara katolik. Nenek moyangnya yang merupakan kaum Calvinis, dulu melarikan diri dari negara "*Holland*" atau sekarang Belanda, sekitar abad ke 16 Masehi. Atas dasar itulah orang tuanya kemudian memberikan nama puteranya berdasarkan nama negara asal nenek moyangnya, *Holland* (Belanda).⁶⁷

Pada tahun 1974, Hollande yang saat itu kuliah mulai terjun ke dunia politik. Saat itu, Hollande ikut bergabung menyukseskan kampanye calon presiden Mitterrand sebagai simpatisan. Berselang lima tahun kedepan, Hollande mulai ikut Partai Sosialis. Kemudian pada tahun 1981, Hollande mulai berani mengajukan diri dalam pemilihan Majelis Nasional Prancis, berhadapan langsung dengan lawannya yang bernama Jacques Chirac dari Partai Republik, yang kemudian menjadi

⁶⁶ Julie de Montespan, *Le Mariage de Francois Hollande*, Grasset Publishing, Paris and London, 2015, hal.19.

⁶⁷ *Ibid.*

Presiden Prancis. Hollande terpilih menjadi Presiden Prancis tahun 2012 saat ia berumur 57 tahun.⁶⁸

Hollande pernah menjabat Sekretaris Partai Sosialis pada 1997-2008. Dia pun merupakan walikota Tulle, kota di wilayah tengah Prancis, pada 2001-2008, sekaligus anggota parlemen untuk wilayah Correze. Dengan latar belakang akademis, Hollande telah berhasil menonjolkan diri sebagai "presiden normal" yang bertentangan dengan karakter "hiperaktif" Sarkozy, sehingga berhasil memenangkan dukungan publik.⁶⁹ Dalam melakukan kampanye, Hollande berjanji untuk menekan tingginya angka pengangguran, termasuk dengan mempekerjakan 60.000 guru dalam masa jabatannya, sejalan dengan penciptaan 150.000 lapangan kerja lain. Hollande menentang kebijakan keuangan yang hanya berorientasi pada "penghematan" dan berencana untuk membuka negosiasi pakta fiskal Eropa yang disepakati akhir Desember lalu. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan menambah beberapa usulan baru yang akan memfokuskan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Francois Hollande menjanjikan anggaran belanja negara yang berimbang pada 2017 dan mendesak dibentuknya Badan Suku Bunga Eropa. Hollande merupakan tokoh partai Sosialis mengajukan pajak 75 persen bagi mereka yang memiliki pendapatan di atas 1 juta euro (11.7 miliar) pertahun dan peningkatan upah minimum. Dalam kebijakan luar negeri, Hollande mengatakan ia akan menarik pasukan Prancis dari Afghanistan hingga akhir tahun ini, serta hanya

⁶⁸ "Francois Hollande", dalam <http://www.biography.com/people/fran%C3%A7ois-hollande-20849813>, diakses pada tanggal 29 Maret 2017.

⁶⁹ "Inilah Presiden Prancis Terpilih Francois Hollande", dalam <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/12/05/07/m3mgf6-inilah-profil-presiden-terpilih-prancis-francois-hollande>, diakses pada tanggal 27 Maret 2017.

akan mengintervensi urusan negara lain di bawah mandat yang diberikan Perserikatan Bangsa Bangsa.

2. Politik Luar Negeri Prancis Era Francois Hollande

Francois hollande merupakan presiden Prancis ke-24 yang pada masa kepemimpinannya dihadapkan pada berbagai persoalan dalam dan luar negeri. Pasca terpilihnya Hollande menjadi Presiden Prancis tahun 2012 ia memperkenalkan berbagai orientasi politik dalam dan luar negerinya untuk memperbaiki dan menyempurnakan rezim sebelumnya (Sarkozy). Diantaranya: Berjanji akan mengurangi defisit anggaran negara serta berusaha mempertahankan model sosialisme Prancis; Berusaha membuat generasi muda Prancis menjadi maju dan berusaha mewujudkan keadilan di negaranya; Akan menantang fokus kebijakan negara tetangganya, Jerman yang terkesan memaksakan dilakukannya penghematan anggaran; Berusaha membuat elemen pertumbuhan ekonomi negara akan bisa masuk dalam pakta anggaran Eropa.

Kemudian dalam bidang kebijakan luar negeri, pemerintahan Hollande berupaya mewujudkan kepentingan nasional tanpa terjebak dalam hegemoni negara sekutu, Amerika Serikat dan uni Eropa khususnya Inggris, dan Jerman. Dengan kata lain, orientasi pragmatisme kebijakan luar negeri untuk mencapai kepentingan nasional Prancis, sehingga selain mempertahankan kerjasama yang dianggap lebih rasional Prancis juga merintis kembali kerjasama dengan negara-negara dunia,

meskipun tidak menguntungkan dalam jangka pendek, diantaranya dengan Iran, Qatar, Lebanon dan Suriah.⁷⁰

Prancis terus mempertahankan negaranya sebagai kekuatan menengah yang berusaha untuk mencapai kemampuan pertahanan global. Seperti pendahulunya, Presiden Francois Hollande jelas mengesampingkan kemampuan nuklir Prancis, dan keutamaan dalam sistem internasional melalui keanggotaan tetap Dewan Keamanan PBB. Pada tahun 1981, ketika Presiden Mitterand yang sosialis berkuasa, ada banyak pembicaraan tentang pergeseran kebijakan luar negeri, menghasilkan meningkatnya kekhawatiran di kalangan mitra Prancis, NATO. Sebuah pemerintahan sosialis, dianggap potensial sebagai penyebab pecahnya posisi Prancis yang pro-Barat, karena pemerintah menganjurkan kebijakan luar negeri baru yang lebih responsif terhadap tuntutan negara berkembang. Di samping retorika, Prancis tetap harus menghormati komitmennya terhadap NATO.

Meskipun kritik mengenai komando militer NATO telah dikemukakan oleh Hollande, akan tetapi belum ada keputusan yang bertentangan dengan efek tersebut. Hollande telah mengajukan jadwal baru mengenai penarikan pasukan Prancis dari Afghanistan. Ini adalah pesan penting bahwa Hollande, merupakan politisi sayap kiri. Jean-Yves Le Drian, Menteri Pertahanan yang baru, segera meluncurkan peninjauan kebijakan strategi pertahanan, yang akan selesai pada 2012 dan kemudian diterjemahkan dalam undang-undang perencanaan pertahanan baru di tahun 2013. Bahkan karena hal tersebut dirasakan mendesak, tinjauan strategis

⁷⁰ *Op Cit.*

dikoordinasikan oleh Jean-Claude Mallet, yang pernah mengkaji kebijakan strategis Presiden Sarkozy sebelumnya.⁷¹

Dalam rangka mempercepat proses dan redefinisi perencanaan pertahanan Prancis, kebijakan yang diambil berasal dari variabel independen di luar kepribadian dan program presiden sendiri, diantaranya: belajar dari pengalaman sebelumnya yaitu dari negara Libya dan ramalan mengenai anggaran yang mengalami penurunan, sehingga menyebabkan perhitungan baru ketika memperdebatkan isu-isu kemampuan dan ukuran pertahanan. Kebijakan baru tersebut mengatakan, penggunaan kekuatan militer memang merasa ganjil atas kepresidenan Sarkozy. Intervensi Prancis di Pantai Gading dan Libya menyebarkan campuran instrumen diplomatik dan militer. Ada usaha efektif melobi Dewan Keamanan PBB untuk mengadopsi resolusi sementara tetapi juga menampilkan kesiapan untuk mengejar kepentingan strategis regional melalui penggunaan kekuatan.⁷²

Di bawah kepemimpinan Francois Hollande Prancis juga berupaya mempertahankan mekanisme bilateral dan multilateralisme di tingkat global dengan kekhasan seperti promosi hak asasi manusia dan penekanan pada kebijakan kebudayaan. Visi ini adalah produk dari kebijakan global yang didasarkan pada rasa universalisme yang berasal dari revolusi Prancis dan menjadi kekuatan global sebagai konsekuensi dari pengalaman kolonial dan kepemilikan bom nuklir.

⁷¹ “Matis, French Defense Meet in Brusell”, dalam <https://www.defense.gov/News/Article/Article/1085128/mattis-french-defense-minister-meet-in-brussels>, diakses pada tanggal 28 Maret 2017.

⁷² “Why France Was So Keen Attack Libya”, dalam <https://www.gatestoneinstitute.org/1983/france-libya-attack>, diakses pada tanggal 27 Maret 2017.

Sementara itu, Prancis juga memainkan peran kekuatan tengah dalam konteks multilateral. PBB dan Uni Eropa adalah konteks utama Prancis untuk mengembangkan aksinya. Untuk alasan ini, dapat diamati dari transformasi instrumen kebijakan luar negeri Prancis. Beberapa mengalami pro dan kontra mengenai instrumen nasional (seperti pertahanan otonom dan kemampuan diplomatik) dan inisiatif multilateral. Namun demikian, proses multilateral, dan lebih khusus di Uni Eropa, muncul sebagai kerangka kerja yang realistis untuk dapat mempromosikan kepentingan Prancis di dunia.

Dalam pemerintahan Hollande, Prancis telah memprioritaskan secara utama aliansi bilateral dan usaha-usaha untuk memperkuat skema multilateral termasuk melalui Uni Eropa. Berbeda dengan Sarkozy yang tidak terlalu memprioritaskan hal tersebut dan berfokus pada pendekatan kebijakan *Union for the Mediterranean*. Di bawah pemerintahan Hollande, Prancis juga menggabungkan aspek Geo-Ekonomi secara lebih jauh dan mengeluarkan kebijakan *Middle East and North Africa* (MENA) sebagai wujud dari aspek Geopolitik di Timur-Tengah dan Afrika Utara. Kebijakan ini dikeluarkan dalam mengejar tiga kepentingan utama Prancis, yaitu stabilitas regional, keamanan energi dan ekspor senjata.